

Pemerintah Berambisi Tingkatkan Produksi Gula

Tanggal : Kamis , 25 Februari 2021
Media : Bisnis Indonesia
Halaman : 4
Wartawan : Ipak Ayu H Nurcaya
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Agus Gumiwang Kartasasmita (*Menteri Perindustrian*)
Rubrik : Industri
Topik : Gula

| UTILITAS PABRIK |

Pemerintah Berambisi Tingkatkan Produksi Gula

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian berambisi memaksimalkan produksi pabrikan gula guna memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi di masyarakat.

Tujuan tersebut akan diwujudkan dengan melakukan pembenahan terkait produktivitas gula. Upaya tersebut dimulai dengan merilis Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dengan aturan itu, ada demarkasi yang bertujuan untuk memberi garis antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi.

Agus menyebut pabrik gula rafinasi dibentuk sebelum 2010 untuk

mempermudah industri makanan dan minuman mendapatkan bahan baku. Kala itu, kebun-kebun belum memadai, sementara kebutuhan industri makanan dan minuman terus bertumbuh.

Alhasil, dibentuklah pabrik gula rafinasi yang berjumlah 11 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta ton per tahun. Namun, utilitasnya baru sekitar 65% dengan produksi sekitar 3 juta ton.

"Jika tidak melakukan demarkasi ini, pabrik gula rafinasi tidak akan pernah optimal, begitu pula sebaliknya," katanya kepada *Bisnis*, baru-baru ini.

Menurutnya, ketika pabrik gula rafinasi mengalami kapasitas penuh, akan diperlukan rumusan kebijakan baru. Salah satu opsinya dengan pembukaan investasi baru, mengingat rata-rata kebutuhan industri makanan

dan minuman tumbuh 5% dan sempat menembus dua digit sebelum pandemi Covid-19.

Langkah lain yang sedang ditempuh saat ini adalah revisi Permenperin No. 10/2017 tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula.

Agus menyebut revisi regulasi tersebut dalam rangka percepatan dan pemberian insentif agar ada investasi baru untuk pabrik gula yang terintegrasi dengan tebu. Pemerintah menyadari menjaga produksi kebun agar kapasitas mesin tetap penuh tidak mudah.

Oleh karena itu, revisi regulasi pun akan menasar pada pabrik *existing* yang saat ini sudah beroperasi dengan lahan tebunya.

"Misalnya ada bencana alam atau hama sehingga kebun tidak bisa

menghasilkan bahan baku sesuai dengan kapasitas pabrik, maka kami akan mengizinkan impor dengan hasil verifikasi yang ketat di lapangan," ujar Agus.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menyatakan pihaknya menyambut baik rencana revisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/2017. Menurutnya, izin impor gula mentah bisa berdampak positif pada kinerja pabrik.

Selain itu, persaingan dalam memperebutkan bahan baku tebu di antara pabrik gula, terutama di Pulau Jawa, juga bisa ditekan.

"Kinerja pabrik akan jadi lebih baik, tidak terjadi *idle capacity*. Selama ini masalahnya luas tanam tebu tidak bertambah banyak, sementara jumlah pabrik bertambah," ujarnya.

Harga gula mentah impor yang lebih

murah, lanjut Budi, bisa memberi keuntungan lebih bagi pabrik yang selama ini berhadapan dengan tingginya biaya produksi akibat harga bahan baku tebu.

Adapun, hasil riset oleh Kemendag menunjukkan bahwa harga gula eceran di Indonesia selama 2019—2020 memiliki paritas sampai 28,1% dibandingkan dengan harga di luar negeri secara umum.

"Namun, yang perlu diperhatikan ketika impor gula mentah ini dibuka adalah stabilitas harga di pasar. Jika berlebihan, akan anjlok dan berpengaruh ke harga tebu di petani," lanjutnya.

Oleh karena itu, Budi menilai pemerintah harus menghitung dengan tepat kebutuhan impor gula mentah demi memastikan harga tebu di petani tetap terjaga. (*Ipak Ayu H. N*)